

## **BAB II**

### **KONDISI MASYARAKAT KOTA MEDAN MENJELANG BERDIRINYA UNIVA**

#### **A. Sekilas Tentang Kota Medan**

Sebelum membahas tentang kondisi sosial masyarakat Medan menjelang berdirinya UNIVA, maka perlu diketahui sekilas tentang sejarah kota Medan. Pada mulanya Medan adalah sebuah nama kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590, nenek moyang Datuk Hamparan Perak (Dua Belas Kota) dan Datuk Sukapiring, yaitu dua dari empat kepala suku Kesultanan Deli.<sup>1</sup>

Beberapa pendapat mengenai asal-usul kata “medan”, di antaranya pendapat yang menyatakan kata “medan” berasal dari bahasa Batak Karo. Yaitu “medan” yang berarti “menjadi sehat” ataupun “lebih baik”. Hal ini berdasarkan sumber-sumber sejarah bahwa kota Medan pertama sekali didiami oleh suku Batak Karo, tentunya kata “Medan” itu haruslah berasal dari bahasa Batak Karo. Berdasarkan pada kenyataan bahwa Guru Patimpus adalah seorang tabib yang memiliki keahlian dalam pengobatan tradisional Batak, dapat menjadikan orang sakit menjadi sehat atau lebih baik.<sup>2</sup>

Kota Medan termasuk kota yang mengalami sejarah cukup panjang. Pada masa kesultanan dan munculnya perkebunan hingga era Republik Indonesia Serikat (RIS), kota Medan dijadikan sebagai ibu kota Negara Sumatera Timur. Sejak munculnya maskapai perkebunan pertumbuhan kota Medan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Medan muncul sebagai pusat kegiatan ekonomi, administrasi pemerintahan, politik, dan kebudayaan. Pada tanggal 15 Agustus 1950, pasca kembalinya RI dari bentuk RIS ke NKRI, Propinsi Sumatera Utara kembali terbentuk dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli dengan Medan ditetapkan sebagai Ibukotanya.

---

<sup>1</sup>Tengku Lukman Sinar, *Riwayat Hamparan Perak* (t.p.p.: t.p., 1971), h. 36.

<sup>2</sup>Darwin Prinst, *Kamus Batak Karo-Indonesia* (tpp.: tp., 2002), h. 73.

Sedangkan yang menjadi Gubernur definitif pertamanya adalah A. Hakim yang kemudian pada tahun 1953 diganti oleh Mr. S.M. Amin.

Selain sebagai ibukota propinsi, Medan juga ditetapkan sebagai daerah tingkat II yang mana menjelang berdirinya UNIVA, Medan dipimpin oleh seorang walikota yang bernama Hadji Muda Siregar menjabat 6 Desember 1954 - 14 Juni 1958.<sup>3</sup> Tidak kelihatan peran walikota terhadap perkembangan UNIVA, namun peran Ketua DPR Kotapraja Medan waktu itu, Mr. Tagor Ginagan Harahap sangat aktif sejak awal berdirinya UNIVA.<sup>4</sup> Ketika peresmian pembukaan UNIVA (18 Mei 1958) ia telah menyampaikan pidato yang sangat berkualitas dan ketika pembentukan Dewan Kurator ia terpilih sebagai salah seorang pengurus. Sedangkan yang menjadi ketuanya adalah Adnan Nur Lubis Ketua DPRD-SU. Ia adalah alumni Maktab Islam Tapanuli (MIT) dan pernah sebagai guru MIT (1922)<sup>5</sup>. Ketika awal berdiri Al Washliyah ia pun menjadi pengurus namun pada tahun 1932 ia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi tersebut. Selanjut ia aktif dalam pergerakan kebangsaan Partai Indonesia atau partai Gerindo.<sup>6</sup>

Pada 7 Desember 1956, Propinsi Sumatera Utara resmi berdiri dengan wilayah mencakup Sumatera Timur dan Tapanuli.<sup>7</sup> Gubernur definitif S.M. Amin digantikan oleh Z.A. St. Kumala Pontas yang menjabat gubernur sampai tahun 1960.<sup>8</sup> Pada acara peringatan diesnatalies UNIVA yang ke-2 (18 Mei 1960), Z.A. St. Kumala Pontas telah menyampaikan pidatonya selaku anggota Dewan Kurator yang berjanji akan meningkatkan pemberian bantuan untuk kemajuan UNIVA dalam berbagai bidang.

---

<sup>3</sup>Situs web resmi: <http://www.pemkomedan.go.id/>, diunduh 5 Pebruari 2011.

<sup>4</sup>Nukman Sulaiman, *et. al.*, *Lustrum ke VI Universitas Al Washliyah 18 Mei 1958 - 18 Mei 1988* (Medan: UNIVA Press, 1988), h. 33.

<sup>5</sup>Muaz Tanjung, "Pendidikan Islam di Medan Pada Awal Abad ke-20: Studi Historis Tentang Maktab Islamiyah (1918-1942)", Tesis Pascasarjana IAIN-SU, 2004, h. 89.

<sup>6</sup>Nukman Sulaiman, *Al Washliyah ¼ Abad* (Medan: PB. Al Washliyah, 1956), h. 40.

<sup>7</sup>Iwan Gayo, *et. al.*, *Buku Pintar Seri Senior* (Jakarta: Upaya Warga Negara, cet. 17, 1994), h. 39.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 40.

## 1. Kondisi Geografis

Dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya di Sumatera Utara, kota Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut.<sup>9</sup>

Di samping sebagai daerah pinggir jalur pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang atau pintu masuk kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri terutama bagi kegiatan ekspor-impor. Sejak tahun 1950, Medan telah beberapa kali melakukan perluasan areal, dari 1.853 ha menjadi 26.510 ha pada tahun 1974. Dengan demikian dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan telah bertambah luas hampir delapan belas kali lipat.<sup>10</sup>

## 2. Kondisi Demografis

Sejarah pendataan pertumbuhan penduduk kota Medan dimulai dari kedatangan bangsa asing. John Anderson, seorang pegawai Pemerintah Inggris yang berkedudukan di Penang, berkunjung ke Medan tahun 1823. Dalam bukunya bernama "*Mission to the Eastcoast of Sumatera*", edisi *Edinburg* tahun 1826, menyatakan keadaan kota Medan masih merupakan satu kampung kecil yang berpenduduk sekitar 200 orang.<sup>11</sup> Penduduk daerah ini terus meningkat menjadi 14.000 pada tahun 1905 dan meningkat lagi pada tahun 1930 menjadi 76.584 jiwa. Hingga pendudukan Jepang 1943 penduduk kota Medan berjumlah 108.000.<sup>12</sup>

Peningkatan jumlah penduduk tersebut diawali dengan adanya migrasi secara besar-besaran pada akhir abad ke-19. Ada dua gelombang migrasi besar yang datang ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, Situs web resmi: <http://www.pemkomedan.go.id/>.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>John Anderson, *Mission to the Eastcoast of Sumatera*, dalam Tengku Lukman Sinar, *Riwayat Hampan Perak* (t.t.p., tp., 1971), h. 48.

<sup>12</sup>*Ibid.*

Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Tetapi setelah tahun 1880 perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang Tionghoa, karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan sering melakukan kerusuhan. Perusahaan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh perkebunan kemudian didorong untuk mengembangkan sektor perdagangan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing, Banjar dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, tetapi untuk berdagang, menjadi guru, dan ulama.

Para migran gelombang kedua tersebut sangat berperan dalam hal menjadikan Islam sebagai agama mayoritas penganutnya. Di samping suku asli orang Melayu, yang memang sudah beragama Islam. Para migran sangat mempengaruhi corak kehidupan beragama di masyarakat khususnya migran yang berasal dari Tapanuli Selatan yaitu orang Mandailing. Mereka membuka lembaga pengajian dan pendidikan Islam untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Agar keluarga mereka memperoleh pendidikan yang baik maka muncullah inisiatif untuk mendirikan lembaga pendidikan yang permanen.

Ketika Syaikh Ja'far Hasan<sup>13</sup> pulang dari menuntut ilmu di Mekkah tahun 1914, ia memberikan pengajian di rumahnya di Kampung Petisah. Setelah beberapa tahun berjalan, masyarakat Mandailing di Medan merasa perlu membangun suatu gedung perguruan yang terpisah dari rumah seseorang. Atas usaha masyarakat Mandailing tersebut, maka didirikanlah sebuah lembaga pendidikan yang diberi nama *Maktab* Islam Tapanuli (MIT) pada tahun 1918, berlokasi di Kampung Kesawan Medan.<sup>14</sup> Para pelajar dan guru dari MIT inilah yang mendirikan organisasi Al Washliyah tahun 1930 dan pada tahun 1958 organisasi Al Washliyah berhasil pula mendirikan sebuah universitas bernama Universitas Al Washliyah dengan nama singkatan UNIVA.

---

<sup>13</sup>Syaikh Ja'far Hasan bin Syaikh Hasan Tanjung (1880-1950), adalah migran asal kampung Roburan Lombang Tapanuli Selatan, dalam Sulaiman, *Al Washliyah ¼ Abad*, h. 408.

<sup>14</sup>Tanjung, "*Pendidikan Islam* ", h. 8.

Tabel 1:  
Menurut Volkstelling Keadaan Penduduk Berdasarkan Bangsa dan Suku di Sumatera Timur pada tahun 1930 adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

No	Bangsa/Suku	Angka	%	Jumlah	%
A	Asing				
1	Eropa	11.079	0,7		
2	Cina	192. 822	11,4		
3	Lain-lain	18. 904	1,1		
	Sub. jlh bangsa-bangsa asing			222.805	13,2
B	Asli Indonesia				
4	Jawa	589.836	35,0		
5	Toba Batak	74.224	4,4		
6	Mandailaing dan Angkola	59. 638	3,5		
7	Minangkabau	50. 677	3,0		
8	Sunda	44. 107	2,6		
9	Banjar	31. 266	1,9		
10	Aceh	7.795	0,5		
11	Lain-lain	24. 646	1,5		
	Sub.jumlah migran pribumi			822.189	52,3
12	Melayu	334.870	19,9		
13	Karo-Batak	145.429	8,6		
14	Simalungun-Batak	95.144	5,6		
15	Lain-lain	5.436	0,3		
	Sub jlh penduduk asli Indonesia			580.879	34,4
	Jumlah	1.625.873			100,0

Dari tabel di atas terlihat bahwa kelompok migran yang terbesar adalah berasal dari Jawa, diikuti Toba, Mandailing dan Minangkabau. Suku Jawa umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Kedatangan mereka pada umumnya bukan atas kemauan sendiri, kendati mereka mempunyai harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tidak demikian halnya dengan kelompok migran yang lain. Mereka umumnya datang karena keinginan sendiri, dan untuk mengubah nasib agar lebih baik dari kehidupan ketika di

<sup>15</sup>Hasanuddin, *Al Washliyah Api.*, h. 13.

kampung halaman. Kaum migran yang spontan itu datang dengan membawa bekal ketrampilan. Misalnya orang Toba mereka terampil berladang dan bertani. Tetapi kedatangannya mereka dalam jumlah yang besar dihalangi oleh sultan-sultan Melayu karena khawatir kerajaan mereka akan dikuasai oleh orang-orang Kristen atau karena orang Batak dalam anggapan mereka belum beragama. Namun sikap sultan tersebut tidak menghalangi para migran Batak untuk datang ke tanah Deli. Bahkan migran Batak rela melepas marganya dan berperilaku seperti suku Melayu.

## **B. Kondisi Masyarakat Menjelang Berdirinya UNIVA**

### **1. Paham Keagamaan**

Sumatera Timur sebagai daerah tujuan para migran dari berbagai suku dan bangsa, berdampak kepada munculnya beberapa agama seperti; Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha. Di antara agama-agama tersebut yang paling banyak penganutnya adalah Islam yang disebut Muslim. Muslim terbagi kepada dua paham golongan, yaitu golongan Kaum Muda (kelompok modernis) dari organisasi Muhammadiyah dan golongan Kaum Tua (kelompok tradisional).<sup>16</sup> Sejak awal abad kedua puluh, dua golongan ini secara sosiologis sering menimbulkan gesekan-gesekan kecil sesama mereka.

Tidak diketahui siapa orang pertama yang menggunakan istilah Kaum Muda dan Kaum Tua. Namun istilah ini cukup populer di masyarakat dan dipakai terutama oleh para sosiolog, sejarawan dan peneliti agama lokal maupun asing dalam meneliti masalah keislaman di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut tentang paham keagamaan yang berkembang menjelang berdirinya UNIVA, hal pertama yang perlu diketahui dari Kaum Muda dan Kaum Tua adalah; bahwa mereka sama-sama kelompok Muslim *Sunni* atau *Ahlussunnah wal Jama'ah*, yaitu para pengikut sunnah (tradisi

---

<sup>16</sup>Istilah Kaum Muda dan Kaum Tua digunakan dalam Taufik Abdullah, *Islam di Indonesia* (Jakarta: Tinta Mas, 1974), h. 61.

Nabi) dan merupakan golongan mayoritas dalam masyarakat Muslim dunia.<sup>17</sup> Kelompok Kaum Muda dan kelompok Kaum Tua sama-sama meyakini tentang Rukun iman enam perkara dan Rukun Islam lima perkara.<sup>18</sup>

a. Kaum Muda dan Organisasi Muhammadiyah di Kota Medan

Secara Bahasa Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab yaitu: *محمديّة* dibaca “*Muhammadiyah*” yaitu nama Rasulullah saw., yang diberi tambahan “*ya*” *nisbah* dan “*ta*” *marbutah* yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umat Nabi Muhammad SAW atau pengikut Nabi Muhammad saw.<sup>19</sup> Secara organisasi Muhammadiyah adalah sebuah Persyarikatan yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Dzulhijjah 1330 H / 18 Desember 1912 M di Kauman Yogyakarta.<sup>20</sup>

Sedangkan di kota Medan organisasi Muhammadiyah berdiri pada tanggal 25 November 1927, tiga tahun sebelum berdiri Al Washliyah. Muhammadiyah didirikan oleh sejumlah pedagang kecil dan menengah yang tinggal di kota Medan. Ketuanya yang pertama adalah Hr. Mohammad Said, yang sebelumnya dikenal sebagai ketua Sarekat Islam.<sup>21</sup> Sebagian besar anggota Muhammadiyah berasal dari suku Minang, walaupun ada juga dari suku Jawa dan Melayu.

Awalnya organisasi Muhammadiyah merupakan sebuah perkumpulan pengajian. Karena jumlah anggotanya terus meningkat maka perkumpulan ini ditingkatkan menjadi sebuah organisasi. Usaha pertama yang mereka lakukan adalah mendirikan sebuah sekolah di jalan Nagapatan Kampung Keling yang peresmianya dilakukan oleh Putra Mahkota Deli.<sup>22</sup> Selain itu kegiatan

---

<sup>17</sup>Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur* (Yogyakarta: LESFI, cet. ketiga, 2004), h. 160.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>M. Mukhsin Jamil, *et. al.*, *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, al Irsyad, Persis dan NU* (Cirebon: Fahmina Institute, 2008), h. 28.

<sup>20</sup>Yunan Yusuf, *et. al.*, *Ensiklopedi Muhammadiyah* (Jakarta: RajaGrafindo, 2005), h. 250.

<sup>21</sup>Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 76

<sup>22</sup>Pewartu Deli, dalam Thaib, *Universitas Al Washliyah*, h. 185.

Muhammadiyah di Medan sama seperti di tempat lain yaitu tabligh, organisasi wanita, kependuan, panti asuhan dan lain sebagainya.

Kendatipun Muhammadiyah awalnya memiliki hubungan yang baik dengan pihak Sultan bukanlah berarti semua keinginan Muhammadiyah dapat dikabulkan. Hal ini terbukti dengan timbulnya konflik antara pihak Muhammadiyah dengan Sultan. Konflik tersebut muncul dikarenakan pihak Muhammadiyah gencar melakukan gerakan *tanzih* dan *tajdid* untuk memberantas praktek ibadah yang sudah mapan di tengah masyarakat.

Adapun organisasi Muhammadiyah gigih melakukan suatu gerakan *tanzih* yaitu suatu upaya pemurnian, pembenahan dan pengikisan terhadap keyakinan atau tradisi-tradisi yang dipandang telah mengotori ajaran pokok dalam agama Islam. Muhammadiyah sepenuhnya menghendaki kemurnian atas ajaran agama tanpa diselipi oleh keyakinan atau tradisi lokal (*sinkretisme*).<sup>23</sup> Sedangkan *tajdid* yaitu merupakan upaya untuk memperbaharui dan mencari format baru (*reinterpretasi*) melalui ijtihad terhadap hukum-hukum *syara'* yang *furu'iyah* langsung kepada sumber ajaran Islam yakni al-Quran dan Hadis.<sup>24</sup>

Ketika Muhammadiyah mulai berkembang, masyarakat kota Medan banyak melakukan praktek ibadah yang dicampur dengan tradisi lokal. Praktek ibadah tersebut gencar dikikis habis oleh aktifis Muhammadiyah, di antaranya; *tahlilan*, *nyeratus*, *talkin*, selamat, tepung tawar, *marhaban*, tarawih dua puluh rakaat, azan dua kali dalam salat Jum'at, memuji-muji silsilah sultan dalam khutbah Jum'at, peringatan haul dan lain-lain. Praktek sinkretisme tersebut dianggap bid'ah dan haram hukumnya, karena dianggap menyimpang dan tidak diajarkan di dalam al- Qur'an dan Hadis. Tidak hanya itu saja bahkan Muhammadiyah mengharamkan praktek tarikat karena menurut mereka tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad saw. Hal ini tampak

---

<sup>23</sup>Jamil, *et. al.*, *Nalar Islam* h. 54.

<sup>24</sup>*Ibid.*



dalam ungkapan Hamka: "Lebih baik khalifah suluk (para syaikh tarekat) digantung pada pohon kelapa".<sup>25</sup>

Gerakan Muhammadiyah tersebut tentu menimbulkan pertentangan dan konflik, sampai-sampai kondisinya sangat memprihatinkan, yaitu pecahnya persatuan di kalangan umat Islam. Sesama saudara kandung putus hubungan dan saling mengkafirkan gara-gara masalah khilafiyah tersebut.<sup>26</sup> Hal ini sangat meresahkan masyarakat dan terus menimbulkan pertentangan.

#### b. Organisasi Al Washliyah dan Paham Keagamaan Sultan Deli

Al Jam'iyatul Washliyah merupakan organisasi Islam didirikan 30 November 1930 / 9 Rajab 1349 H di kota Medan. Al Jam'iyatul Washliyah yang lebih dikenal dengan sebutan Al Washliyah, tujuan utama organisasi ini, pada masa itu adalah untuk mempersatukan umat yang berpecah belah dari berbagai perbedaan pandangan / khilafiyah. Selain untuk mempersatukan umat, organisasi ini juga bertujuan untuk mengembangkan tradisi mazhab Syafi'iyah dan teologi Asy'ariyah. Organisasi ini mendirikan madrasah dan sekolah, hingga universitas yang mana semua lembaga pendidikannya diberi label Al Washliyah. Sejak awal pertumbuhannya hingga kini Al Washliyah dikenal masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang mempraktekkan mazhab Syafi'iyah dan teologi Asy'ariyah.

Melihat kondisi umat Islam yang ketika itu terus berpecah belah dan adanya upaya adu domba dari pihak Belanda yang mengupayakan perpecahan itu melalui penyimpangan-penyimpangan cara beribadah, pembodohan dengan fanatisme beragama yang sempit dan mendorong cara berfikir statis. Perbedaan pandangan dalam hal ibadah dan masalah-masalah cabang agama (furu'iyah) terus meruncing, hingga umat Islam khususnya di Sumatera Utara terbagi menjadi dua golongan yang disebut dengan Kaum Tua dan Kaum

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 67.

<sup>26</sup> Tujuan organisasi Muhammadiyah adalah memperbaiki praktek-praktek pelaksanaan ajaran Islam yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Menurut anggapan mereka ajaran Islam, telah banyak disusupi oleh unsur bid'ah dan khurafat. Untuk merealisir citra-citra ini, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang berprinsip menolak taqlid dan menggalakkan ijtihad.

Muda. Perbedaan paham keagamaan ini semakin hari semakin tajam dan sampai pada tingkat meresahkan.

Perselisihan di kalangan umat Islam di Sumatera Utara khususnya kota Medan, membuat para pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) Medan berupaya untuk mempersatukan kembali. Upaya untuk mempersatukan umat Islam terus dilakukan dan akhirnya terbentuklah organisasi Al Jam'iyatul Washliyah yang artinya Perkumpulan yang menghubungkan. Maksudnya adalah menghubungkan manusia dengan Allah Swt., dan menghubungkan manusia dengan manusia (sesama umat Islam). Organisasi ini membentuk beberapa majelis di antaranya Majelis Dewan Fatwa Al Washliyah, sebagai lembaga khusus dalam keorganisasian Al Washliyah yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan masalah khilafiyah tersebut.

Nama Al Jam'iyatul Washliyah diberikan oleh seorang guru dan seorang ulama yang dihormati di Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) Medan yaitu Syech H. Muhammad Yunus. Ketua Al Washliyah yang pertama diserahkan kepada Ismail Banda lantaran usianya lebih tua dari anggota yang lain.

Munculnya organisasi pengembang mazhab *Syafi'iyah* dan teologi *Asy'ariyah* ini mendapat sambutan dari Sultan, karena organisasi ini dapat membantu tugas Sultan dalam menjalankan bidang keagamaan. Sehubungan strategi Belanda membatasi kekuasaan Sultan, yaitu hanya mengurus masalah keagamaan dan adat istiadat saja.<sup>27</sup> Sultan sebagai pengurus masalah agama mengangkat para kadhi yang bertugas menjalankan syariat Islam. Kadhi pada tingkat kepenghuluan mengurus masalah nikah, talak dan rujuk. Pada tingkat kerajaan kadhi disebut mufti yang bertugas menyelesaikan masalah agama secara umum. Selain itu Sultan juga mengangkat imam salat dan nazir sebagai pengawas mesjid.<sup>28</sup>

Kesamaan paham antara Sultan Deli dengan pengurus organisasi Al Washliyah yang umumnya adalah para perantau asal Mandailing

---

<sup>27</sup>Hasanuddin, *Al Jam'iyatul Washliyah*, h. 4.

<sup>28</sup>Usman Pelly, *Ulama di Tiga Kesultanan Melayu Pesisir* (Jakarta: Leknas LIPI, 1981), h. 43.

menyebabkan para muballig suku Mandailing tidak mendapat hambatan ketika berdakwah. Bahkan Syeikh Hasan Maksum sebagai Imam Paduka Tuan turut membina organisasi Al Washliyah ketika itu. Kadhi yang diangkatpun terdiri dari orang-orang Al Washliyah di antaranya, yaitu Kadhi H. Ilyas dari suku Melayu dan H. Mahmud Ismail Lubis dari suku Mandailing.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa awal berdirinya organisasi Al Washliyah menunjukkan kerjasama yang baik dengan pihak kesultanan.

Sementara ulama asal Minangkabau yang berpaham Muhammadiyah kurang diterima bahkan ditolak oleh Sultan. Menurut Lukman Sinar, pada tahun 1932 para sultan di Sumatera Timur melarang berdirinya organisasi Muhammadiyah, dan juga melarang anggota Muhammadiyah menjadi khatib Jum'at di Mesjid Lama Medan.<sup>30</sup>

Namun sejak tahun tiga puluhan mulai terjadi perubahan, yaitu adanya kerjasama antara Muhammadiyah dengan Al Washliyah. Hal itu terlihat pada tahun 1935 pada kegiatan salat Idul Fitri bahwa yang menjadi imam adalah Syeikh Mahmul Hayyat yang merupakan tokoh Al Washliyah sedangkan khatib Haji Bustami Ibrahim, tokoh Muhammadiyah. Selain itu, pada 13 Juni 1935 Al Washliyah mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw yang dihadiri oleh kedua tokoh organisasi tersebut. Dari pihak Al Washliyah hadir Abdur Rahman Shihab sedangkan dari Muhammadiyah antara lain Tengku Fahrudin, Haji Ismail Lubis, Haji Abdul Majid dan tokoh-tokoh Aisiyah.<sup>31</sup> Ketika Muhammadiyah mengadakan prangko amal tahun 1941, aktifitas ini juga mendapat dukungan dari Al Wasliyah, di mana ketika Udin Syamsuddin mengadakan tabligh umum ia mengajak warga Al Washliyah untuk berpartisipasi membeli prangko amal tersebut, hingga tabligh itu usai terjual sebanyak 306 lembar prangko.<sup>32</sup> Kemudian kedua organisasi tersebut terus bekerja sama untuk mengusir penjajah dan dilanjutkan hingga sekarang.

---

<sup>29</sup>Sulaiman, *Al Washliyah ¼ Abad*, h. 410 dan 411.

<sup>30</sup>Tengku Lukman Sinar, *Sejarah Medan Tempo Doeloe* (Medan: tp., 1991), h. 71.

<sup>31</sup>Timbul Siregar, *Sejarah Kota*, h. 66.

<sup>32</sup>Hasanuddin, *Al Jam'iyatul Washliyah*, h. 68.

## 2. Bidang Politik

Pada awal tahun lima puluhan di Indonesia khususnya Kota Medan menjadi pusat kegiatan politik. Hal itu ditandai dengan banyaknya berdiri partai politik. Hampir semua partai-partai politik yang ada di Jawa mendirikan cabangnya di Medan, seperti Serikat Islam, Murba, PKI, PNI, Partai Katholik dan Partai Masyumi.

Menjelang pemilu Pertama 1955 Udin Syamsuddin dan Arsyad Thalib Lubis aktif berceramah mengkampanyekan Partai Masyumi kepada warga Al Washliyah yang jumlahnya mayoritas di Sumatera Utara. Bahkan karena terlalu seriusnya berkampanye Udin Syamsuddin pernah menjadi sasaran pengeroyokan para tukang pukulnya PKI. Peristiwa ini sempat menggemparkan masyarakat yang akhirnya pengadilan memutuskan hukuman kepada masing-masing pelaku.<sup>33</sup> Hal ini terus menerus menimbulkan sikap antipati PKI terhadap Masyumi, ketika Udin Syamsuddin dan Arsyad Thalib mencari lahan untuk lokasi pembangunan gedung UNIVA mereka mendapat reaksi keras dari pendukung PKI yaitu Barisan Tani Indonesia.

Berkat keseriusan Udin Syamsuddin dan Arsyad Thalib Lubis, akhirnya pada pemilu pertama untuk Sumatera Utara, Partai Masyumi mendapat suara dan kursi terbanyak dengan 6 kursi parlemen dan 12 kursi konstituante, disusul PNI 3,5, Parkindo 2,5, dan PKI 2,4.<sup>34</sup> Dengan kemenangan tersebut Udin Syamsuddin duduk sebagai anggota Parlemen (DPRD-SU), sedangkan Arsyad Thalib Lubis, Zainal Arifin Abbas, al-Fadhil H. Adnan Lubis, H. Bahrum Jamil, Lubis, duduk sebagai anggota Konstituante.<sup>35</sup> Kemenangan ini semakin menambah kebencian dan dendam orang-orang PKI kepada tokoh-tokoh Partai Masyumi.

Kejayaan PKI tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Medan, melainkan juga oleh mahasiswa yang sedang studi di luar negeri

---

<sup>33</sup> Sulaiman, *Al Washliyah ¼ Abad*, h. 224 dan 225.

<sup>34</sup> Prabudi Said, *Sejarah Harian Waspada dan 50 Tahun Peristiwa halaman Satu* (Medan: PT Prakarsa Abadi Press, cet.2, 1995), h. 124.

<sup>35</sup> Said, *Sejarah Harian*, h.124.

seperti di Universitas al-Azhar Kairo. Hal ini dialami oleh Abdullah Syah<sup>36</sup> dalam penuturannya sebagai berikut:

”Suhu politik tanah air sangat terasa, yang banyak diutus adalah mahasiswa NU Jawa dan orang Medan sedikit sekali. Suasana Komunis terasa sampai ke Kairo, tiga staf KBRI di Kairo adalah orang Komunis. Bahkan koresponden ANTARA di Kairo bernama Ibrahim Isa adalah orang Komunis. Terasanya pengaruh komunis itu sampai pada pertanyaan penguji tentang apa yang terjadi di Indonesia yang mayoritas muslim, tapi berkembang paham Komunis”.<sup>37</sup>

Partai Komunis Indonesia (PKI), yang pernah melakukan tindakan makar terkenal dengan peristiwa Madiun 1948, masih mendapat kesempatan secara maksimal, merehabilitasi diri dan duduk di pemerintahan. Mereka mengadakan aliansi dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Menurut jalan pikiran PKI, yang potensial dan harus didekati adalah PNI.<sup>38</sup> Situasi tegang dan kesibukkan partai menyebabkan kecemasan dan ketidak amanan terjadi di berbagai daerah sementara kemakmuran rakyat terabaikan.

Kondisi politik yang tidak stabil, menyebabkan ketidak stabilan roda pemerintahan, sering terjadi perubahan kabinet secara mendadak. Selama tahun 1946-1967 tercatat 25 kali perubahan kabinet, tujuh di antaranya memimpin hanya sekitar 12-23 bulan, sedangkan 12 kabinet memimpin hanya 6-11 bulan, dan 6 kabinet hanya bertahan selama 1-4 bulan.<sup>39</sup>

Sementara presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan yang di sebut ”Konsepsi Presiden” dan ”Demokrasi Terpimpin” (1957-1959) yang ditampilkan dengan gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan presiden berakses kepada terpecahnya dua kelompok masyarakat yaitu kelompok pro dan kontra. Adapun partai politik yang pro dengan Soekarno adalah Nahdhatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan Persatuan Serikat Islam Indonesia (PSII). Hal itu terlihat dari sikap NU dan

---

<sup>36</sup>Ia tercatat sebagai mahasiswa Universitas Al Azhar Mesir tahun 1964 dan menamatkan studinya tahun 1967.

<sup>37</sup>Ahmad Perdana *et. al.*, *Mereka Berkata Tentang Abdullah Syah* (Medan: Duta Azhar, 2009), h. 16-17.

<sup>38</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI Latar Belakang Aksi dan Penumpasannya* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1994), h. 26.

<sup>39</sup>Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonsia* (Jakarta: Radjawal, 1981), h. 43.

PERTI pada tahun 1953 bertempat di Istana Cipanas Bogor menganugerahkan gelar "*Waliyyu al-amri adh-dharuuri bi asy-syaukah*" (penguasa yang secara darurat dianggap mempunyai kekuasaan menetapkan hukum), yaitu sebuah legitimasi agama atas kedudukannya sebagai presiden.<sup>40</sup> Partai yang pro mendapat jabatan atau kekuasaan di pemerintahan.

Namun legitimasi tersebut tidak diakui partai Masyumi melalui tokohnya M. Arsyad Thalib Lubis,<sup>41</sup> Zainal Arifin Abbas, H. Adnan Lubis, H. Bahrum Jamil, dan Udin Syamsuddin. Sikap Masyumi yang sangat tegas dan tidak sejalan dengan pemerintah sangat dibenci oleh PKI, akhirnya Masyumi mendapat tuduhan "kontra revolusi" dan harus menerima keputusan bubar dari presiden Soekarno. Keputusan tersebut didasarkan kepada Keppres No. 200/1960, yang diumumkan tanggal 17 Agustus 1960 dan tokohnya dipenjarakan. Sementara PKI mendapat posisi kian penting karena dianggap sebagai partai pendukung revolusi dan dipercaya untuk melakukan berbagai gerakan politik.<sup>42</sup>

### 3. Bidang Ekonomi

Medan adalah sebuah kota yang memiliki potensi sebagai kota dagang dan industri yang menjiwai hampir seluruh kegiatan masyarakatnya. Hal ini disebabkan fungsi Medan sebagai kota pelabuhan dan letaknya yang sangat strategis. Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, penduduk kota Medan berprofesi di bidang perdagangan. Umumnya mereka menjadi pedagang komoditas perkebunan. Setelah kemerdekaan, sektor perdagangan secara kontinyu didominasi oleh etnis Tionghoa dan Minangkabau. Bidang pemerintahan dan politik, dikuasai oleh orang-orang Mandailing.

---

<sup>40</sup>Dhuroruddin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), h. 78.

<sup>41</sup>M. Arsyad Thalib Lubis tidak setuju dengan gelar yang diberikan kepada Soekarno dan ia menurunkan tulisan-tulisan tentang syarat-syarat sebagai *ulil amri*. Menurutnya sedikit pun tidak ditemukan pada diri Presiden Soekarno syarat-syarat tersebut. Arifinsyah, *Wacana Pluralisme Agama Kontemporer* (Bandung, Citapustaka: 2002), h.97.

<sup>42</sup> Dhuroruddin, *Akar Konflik.*, h. 77-78.

Menjelang berdirinya UNIVA, era 1950-1966 terjadi ketidak stabilan ekonomi secara nasional, sehingga inflasi sampai 650 %. Peredaran uang meningkat menjadi 701 %, sementara harga-harga membumbung tinggi mencapai 635 %.<sup>43</sup> Dunia moneter di Indonesia sejak 24 Agustus 1959 mengalami penurunan nilai mata uang. Pengumuman mengenai penurunan nilai uang kertas dari Rp.500 dan Rp.1000, masing-masing menjadi Rp.50 dan Rp.100. Selain itu setiap deposito bank dibekukan untuk sejumlah Rp. 25.000 ke atas sebanyak 90 %. Masyarakat menjadi geger, tak terkecuali di kota Medan dan semua pemegang uang ribuan berusaha secepatnya menukarkan uangnya dengan membeli segala macam barang. Pusat-pusat perdagangan di kota Medan seperti Kesawan, Kanton, Jalan Perniagaan dan Pusat Pasar sangat sibuk. Ketika pemilik toko mendengar siaran pemerintah melalui radio, mereka buru-buru menutup tokonya. Pada umumnya para pedagang bingung dan terkejut mendengar pengumuman itu bahkan ada yang lemas hingga jatuh pingsan.<sup>44</sup>

Dalam kondisi ekonomi yang sulit itulah pembangunan gedung kuliah UNIVA berlangsung. Berkat kerja keras pengurus Al Washliyah yang sebahagian mereka adalah orang pemerintahan dan semangat berinfak dari wali murid, guru-guru Al Washliyah, masyarakat dan bantuan dari Kementerian Agama RI, terkumpul uang untuk pembelian tanah dan terbangunlah gedung kuliah UNIVA yang pertama.

Dengan inflasi yang mencapai 650% itu, membuat harga barang bangunan melambung tinggi, menyebabkan pembangunan juga agak tersendat. Kondisi ekonomi waktu itu menyebabkan warga masyarakat menjadi resah, rakyat banyak mengalami kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Sebagai akibat dari inflasi itu banyak rakyat yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi bahkan mereka banyak menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka.

---

<sup>43</sup>Mochtar Mas' oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, dalam Dhuroruddin, *Akar Konflik*, h. 80.

<sup>44</sup> Said, *Sejarah Harian Waspada*, h.134.

#### 4. Bidang Pendidikan

Pasca kemerdekaan era tahun 1950-1960, lembaga pendidikan tinggi di Indonesia khususnya di kota Medan merupakan sesuatu yang mahal dan langka. Sedikit sekali masyarakat yang mampu dan mau memikirkan tentang pendidikan, apalagi untuk kuliah. Memang pada waktu itu sudah berdiri beberapa universitas di kota Medan, satu negeri dan lainnya swasta. Universitas negeri yaitu; USU berdiri tahun 1952, sedangkan universitas swasta yaitu; UISU (1952),<sup>45</sup> Universitas HKBP Nomensen (1954),<sup>46</sup> Universitas Tjut Nyak Dhien (1956),<sup>47</sup> UMSU (1957)<sup>48</sup> dan UNIVA (1958). Namun universitas tersebut bagaikan menara gading yang sangat sulit dijangkau masyarakat. Hanya orang-orang tertentu yang mampu untuk duduk di bangku kuliah. Adapun peminat dari universitas tersebut terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Kelompok nasionalis lebih memilih kuliah di universitas umum seperti; Gading Hakim (dr di Medan) kuliah di USU dan T.M. Razali (pengusaha nasional) kuliah di UHN tahun 1958. Sedangkan universitas agama diminati oleh para agamawan, seperti; Bactiar Hamzah mantan Menteri Agama RI, dan Abdullah Syah (sekarang Ketua MUI SU) yang kuliah di UISU. Sementara yang kuliah di UMSU pada waktu itu terbatas hanya orang-orang dari kalangan Muhammadiyah saja.

Langkanya masyarakat yang duduk di bangku kuliah disebabkan oleh rendahnya kemampuan ekonomi, diperparah lagi oleh huru hara bidang politik serta sistem kemasyarakatan yang belum kondusif. Masyarakat umum sudah merasa cukup puas apabila sudah menamatkan pendidikan di Sekolah Rakyat (SR). Pemerintah memang sudah menasionalkan sekolah-sekolah bekas Belanda dan Jepang, namun belum dikelola dengan baik. Sekolah-sekolah Al Washliyah juga belum beroperasi dengan baik dalam menjalankan kegiatan

---

<sup>45</sup>[http://www.uisu.ac.id/Profil\\_UISU](http://www.uisu.ac.id/Profil_UISU) diunduh 5 Pebruari 2011

<sup>46</sup><http://www.nommensen.org>, diunduh 5 Pebruari 2011

<sup>47</sup><http://www.utnd.ac.id/>, diunduh 5 Pebruari 2011

<sup>48</sup> <http://www.umsu.ac.id/umsu/sejarah.html>, diunduh 5 pebruari 2011.



belajar mengajar karena mendapat tekanan dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Partai Komunis Indonesia tidak senang kepada sekolah-sekolah Al Washliyah karena berasaskan pada pendidikan agama. Oleh karena itu memperjuangkan pendidikan agama pada masa jayanya PKI dapat membahayakan keselamatan jiwa.<sup>49</sup> Hal ini dialami oleh Ani Idrus, Pendiiri harian Waspada. Ani Idrus tampil pada waktu itu menyampaikan prasaran dan resolusi untuk mengatasi kejahatan dan kenakalan anak-anak remaja. Ia mengusulkan agar pendidikan agama dimasukkan dalam kurikulum sekolah-sekolah negeri dan swasta. Usulan tersebut mendapat reaksi yang keras dari anggota-anggota DPRGR dari golongan Komunis diwakili oleh Sumarno Hasibuan. Soemarno dari fraksi Barisan Tani Indonesia (BTI) berpendapat bahwa maraknya kejahatan anak-anak muda itu terjadi akibat sistem masyarakat yang bobrok dan pengaruh imperialisasi. Karena itu, menurutnya pendidikan Pancasila dan Manipol Usdek lebih penting dari pada pendidikan Agama.<sup>50</sup>

Ani Idrus waktu itu aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRGR) Tk.I Sumatera Utara. Sebagai anggota Dewan ia risau dengan kondisi maraknya kenakalan dan kejahatan anak-anak muda yang dikenal dengan sebutan "crossboy".<sup>51</sup> Hal ini juga diungkapkan oleh Bachtiar Hamsah, bahwa ketika ia bersekolah di SMA Kutacane tidak sedikit pelajar yang membawa pisau ke sekolah. Ketika guru sedang menulis di papan tulis ada saja siswa yang melemparkan pisaunya ke papan tulis, dan pisau itu menancap di sana. Tujuannya tentu tak lain mengintimidasi guru supaya tidak memberi nilai jelek kepadanya.<sup>52</sup> Menurut Shafwan Hadi Umry bahwa sekitar tahun 50-an banyak tumbuh geng-geng remaja dan perkelahian antar geng yang kemudian dikenal lebih populer dengan istilah "Preman

---

<sup>49</sup>Menteri P&K pada waktu itu (1957) adalah Prof. Dr. Priyono dari Barisan Tani Indonesia yang pro terhadap PKI dan ia tidak mengeluarkan statemen apapun terhadap kondisi tersebut.

<sup>50</sup>Said, *Sejarah Harian*, h. 33.

<sup>51</sup>*Ibid*

<sup>52</sup> Bachtiar Chamsyah, "Pak Nasir Yang Saya Kenal" dalam Lukman Hakim, *et. al.*, 100 *Tahun Mohammad Natsir: Berdamai dengan Sejarah* (Jakarta: Republika, 2008), h. 10.

Medan”.<sup>53</sup> Banyaknya ulah remaja yang berperilaku amoral tersebut hampir ada di semua daerah di Sumatera Utara pada masa itu.

### C. Kondisi Organisasi Al Washliyah

Menjelang UNIVA didirikan (1958) kondisi organisasi Al Washliyah sedang mencapai kemajuan. Al Washliyah saat itu telah berusia dua puluh delapan tahun (1930-1958). Perkembangan dan kemajuan yang dicapai Al Washliyah menjadi pendorong berdirinya UNIVA. Adapun perkembangan Al Washliyah yang sangat pesat itu menjadikannya organisasi keagamaan terbesar di Sumatera Utara. Sejak tahun 1936, setiap tiga tahun sekali diadakan muktamar yang besar untuk membicarakan problematika dan juga demonstrasi yang bersifat propaganda untuk membuktikan perkembangan organisasi ini.<sup>54</sup> Di setiap daerah telah berdiri cabang bahkan sampai ke luar Sumatera, seperti; Jakarta berdiri 1954, Bali dan Kalimantan 1956.<sup>55</sup> Di samping itu juga Al Washliyah mengalami kemajuan pesat khususnya pada Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (MPPK) dan Majelis *Studiefunds*.

#### 1. Perkembangan Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan

Al Washliyah memiliki sekolah dan madrasah yang tersebar di seluruh pelosok Sumatera Utara. Sejak awal didirikan madrasah dan sekolah tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat karena dikelola secara modern. Madrasah dan sekolah Al Washliyah didirikan secara berjenjang dari mulai jenjang Tajhizi, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, hingga jenjang *Muallimin* dan *Qismul Ali* yaitu sederajat dengan SMA. Pada tahun 1943 *Qismul Ali* menamatkan siswanya angkatan pertama.<sup>56</sup> Para lulusannya sebahagian melanjutkan pendidikan ke universitas di Timur Tengah terutama ke Universitas al-Azhar Kairo di Mesir.

---

<sup>53</sup> Said, *Sejarah Harian*, h. 33.

<sup>54</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1974), h. 82.

<sup>55</sup> Sulaiman, *Al Washliyah ¼ Abad*, h. 39.

<sup>56</sup> Sulaiman, *Al Jam'iyatul Washliyah ¼.*, h. 122.

a. Perguruan Al Washliyah

Tingginya animo masyarakat terhadap sekolah dan madrasah Al Washliyah mendorong pimpinan Al Washliyah untuk membuka madrasah dan sekolah di tiap-tiap daerah. Untuk sistem dan manajemen pendidikan (*Qismu Ali* dan *Muallimin*) tampaknya Al Washliyah terinspirasi dan mencontoh pada sistem pendidikan Muhammadiyah yang telah berkembang di Jawa dan Sumatera Barat. Muhammadiyah telah lebih dulu memiliki madrasah *Qismu Ali*, *Muallimin* dan *Muallimat*. KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1918 telah mendirikan “*Al Qismul Arqa*” di kampung Kauman Yogyakarta. Sepanjang sejarahnya, Madrasah *Al Qismul Arqa* mengalami beberapa kali perubahan nama. Secara kronologis, perubahan nama ini dimulai dari Madrasah *Al Qismul Arqa* kemudian *Hogere Muhammadiyah School*, kemudian *Kweekschool Islam* dan menjadi *Kweekschool Muhammadiyah*.<sup>57</sup> Hingga pada akhirnya pada tahun 1934 nama-nama dari bahasa Belanda tersebut diganti. *Kweekschool* menjadi Madrasah Muallimin dan *Normalschool* menjadi sekolah guru.<sup>58</sup>

b. Madrasah dan Sekolah Al Washliyah di Sumatera Utara.

Secara berkelanjutan Al Washliyah telah membuka perguruan di Firdaus Rambah pada 30 Juli 1931,<sup>59</sup> Madrasah Al Washliyah di Jalan Sinagar Medan pada 1 Agustus 1932, dan pada tanggal 28 Pebruari 1933, secara bersamaan diresmikan berdirinya Madrasah Al Washliyah di sekitar kota Medan yaitu di:

- 1) Kota Ma'sum (Jalan Puri)
- 2) Sei Kerah (Sidodadi)
- 3) Kampung Sekip (Sei Sikambing)
- 4) Gelugur
- 5) Pulau Brayan Darat
- 6) Tanjung Mulia.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup>M. Yunan Yusuf, *et. al.*, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: Dikdasmen PP Muhammadiyah dan Raja Grafindo Persada, 2005), h. 243 dan 244.

<sup>58</sup>Jamil, *et. al.*, *Nalar Islam* h. 35.

<sup>59</sup>Sulaiman, *Al Jam'iyatul Washliyah ¼.*, h. 39.

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 41.

Perkembangan Badan Usaha Taman Pembacaan berupa sekolah dan madrasah yang belakangan disebut dengan Majelis Tarbiyah ini diakui dan mengundang kekaguman pengurus sekolah dari organisasi lain. Terbukti antara tahun 1932-1933 tujuh sekolah yang semula dikelola oleh perorangan dan organisasi Al Ittihadiyah yang merupakan milik Suku Melayu diserahkan pengelolaannya kepada organisasi Al Washliyah. Sekolah-sekolah tersebut kemudian mengalami kemajuan yang signifikan.<sup>61</sup> Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang baik, penerapan disiplin yang tinggi, pengaturan kurikulum pelajaran yang tepat dan penyaringan guru-guru yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.

Namun demikian, semua kegiatan masih berpusat dan dikelola oleh organisasi Al Washliyah di Medan. Hal ini menimbulkan kegiatan yang tumpang tindih dan kesibukan terfokus pada Pengurus Besar saja. Kondisi tersebut tentunya memerlukan adanya struktur keorganisasian yang lebih terkoordinir. Untuk itu pada tanggal 29 Juli 1934 dibentuklah organisasi induk yang diberi nama Pengurus Besar Al Washliyah disingkat PB. Al Washliyah untuk menggerakkan majelis-majelis yang telah terbentuk. Kantor PB. Al Washliyah pertama sekali tahun 1950 beralamat di Jalan Wilhelminastraat 111 Medan atau Pusat Pasar Jalan Sutomo sekarang. Kemudian tahun 1959 pindah ke Jalan Sisingamangaraja Medan (depan Makam Pahlawan) Sejak tahun 1986 PB. Al Washliyah berkedudukan di Jakarta Pusat yaitu Jalan Letjend. Suprpto No. 30 C.<sup>62</sup>

Masing-masing majelis diberi wewenang untuk mengelola dan bertanggung jawab pada organisasi cabang dan begitu seterusnya. Dengan sistem yang demikian organisasi Al Jam'iyatul Washliyah kelihatan lebih terkelola administrasinya. Manajemen dan struktur kepengurusannya tampil sebagai organisasi yang modern. Sebagaimana menurut Karel A. Steenbrink; dari segi susunan keorganisasian dan gerakannya dalam bidang pendidikan

---

<sup>61</sup>Hasan Asari, *Al Jam'iyatul Washliyah Kiprah Sosial dan Intlektual*, dalam *Analitica Islamica* (Medan: PPs IAIN-SU, 1997), h. 76.

<sup>62</sup>Biro Hukum dan Humas Sekjend Depag RI, *Profil Lembaga Sosial Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: t.p., 2002), h. 92.

Al Washliyah tergolong modern dan reformis, diantaranya; terlihat dari susunan kepengurusan organisasi, kecenderungan mengirim mahasiswa ke Kairo dan usaha untuk mendirikan sekolah umum yang mengikuti model gubernemen.<sup>63</sup>

Madrasah dan sekolah ini dikelola oleh Majelis Tarbiyah (MPPK) yang tugasnya disebutkan dalam A. D. Pasal 4 ayat d: "Mendirikan rumah-rumah perguruan dan mengatur kesempurnaan peladjaran dan pendidikan". A.R.T. pasal 5 ayat 2: "Madjelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, memimpin dan mengatur kesempurnaan perjalanan perguruan, pengajaran dan pendidikan, memenuhi anggaran dasar pasal 4 bahagian d".<sup>64</sup>

Berdasarkan data MPPK tahun 1956 yang diketuai O.K. H. A. Azis, Jumlah dan tingkatan madrasah dan sekolah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Dan Tingkatan Madrasah / Sekolah**

No	Tingkat Madrasah / Sekolah	Jumlah
1	Tadjhizie	301 buah
2	Ibtidaiyah	296 buah
3	Tsanawiyah	14 buah
4	Qismu Ali	3 buah
5	Tachassus	1 buah
6	Sekolah Rakyat	39 buah
7	SMP	7 buah
8	SMEP	2 buah
9	SGB	2 buah
10	PGA (Muallimin dan Muallimat)	5 buah
Total		670 buah <sup>65</sup>

<sup>63</sup>Steenbrink, *Pesantren, Madrasah*, h. 31 dan 80.

<sup>64</sup>PB. Al Washliyah, *AD dan ART Al Jam'iyatul Washliyah* (t.t.p., t.p., 12 Pebruari 1956), dalam Sulaiman, *Al Jam'iyatul Washliyah 1/4*, h. 342 dan 345.

<sup>65</sup>Sulaiman, *Al Jam'iyatul Washliyah*, h. 303.

Dari tabel di atas terlihat bahwa Al Washliyah mendirikan dua sistem pendidikan yaitu madrasah dan sekolah. Tetapi jumlah yang lebih banyak didirikan adalah madrasah. Madrasah mengajarkan materi agama lebih banyak daripada materi umum. Sedangkan sebaliknya sekolah mengembangkan materi umum lebih banyak dan materi agama hanya sedikit. Pada perkembangannya selanjutnya Al Washliyah kurang mengembangkan sekolah umum, dan lebih memfokuskan pada pengembangan madrasah.

**Tabel 3**

**Masa Belajar di Madrasah dan Sekolah Al Washliyah 1956**

No	Nama Madrasah / Sekolah	Masa Belajar
1.	Madrasah : a. Tajhiziyah b. Ibtidaiyah c. Tsanawiyah d. Al Qismul Ali e. Tachassus	2 tahun 4 tahun (pagi), 6 tahun (sore) 3 tahun 3 tahun 2 tahun
2.	Sekolah Umum : a. Sekolah Rakyat b. Sekolah Menengah Pertama c. Sekolah Menengah Atas d. Sekolah Guru A. e. Sekolah Guru B. f. SMEA	6 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun.
3.	Sekolah Guru : a. Madrasatul Muallimin b. Madrasatul Muallimat c. Jamiatul Washliyah Institute d. Jamiatul Washliyah Institute	4 tahun. 4 tahun. 4 tahun (tingkat Normal School). 3 tahun (tingkat kweek school).
4.	Institute Met de Qoran	7 tahun.
5.	Sekolah Menengah Islam	3 tahun.

Sekolah Guru, Institute *Met de Qoran* dan Sekolah Islam didirikan pada zaman penjajahan Jepang. Seluruh madrasah dan sekolah tersebut tersebar di berbagai daerah Sumatera Utara. Perkembangan dan kemajuan madrasah dan sekolah terutama Qismu Ali yang telah berkali-kali menamatkan siswanya menjadi pendorong utama Al Washliyah untuk mendirikan universitas.

## 2. Perkembangan Majelis *Studiefonds* Al Washliyah

Besarnya perhatian Al Washliyah terhadap pendidikan tidak hanya terhenti pada madrasah atau sekolah lanjutan menengah saja. Al Washliyah juga sangat *concern* dengan perguruan tinggi. Oleh karenanya Al Washliyah berupaya agar kadernya dapat mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, terutama di universitas Al-Azhar Kairo. Untuk dapat mengirim kadernya maka Al Washliyah membentuk Majelis *Studiefonds* yang mengurus beasiswa untuk kader-kader Al Washliyah yang studi di luar negeri. Majelis ini didirikan pada 28 Juni 1936, dengan susunan pengurus pertamanya, Ketua: Udin Syamsuddin, Bendahara; Abdurrahman Husen, Pemeriksa/Pengawas: M. Arsyad Thalib Lubis, Zakaria Abdul Wahab, Mahmud Majid.<sup>66</sup> Walau kondisi ekonomi dan politik belum stabil, ditambah lagi susahnya jalur perhubungan, berkat keseriusan dan kesungguhan pelajar Al Washliyah dan dengan bantuan dana dari Majelis *Studiefonds*, akhirnya beberapa mahasiswa yang studi di al-Azhar dapat selesai kuliah tepat pada waktunya. Mahasiswa angkatan pertama yang mendapat bantuan dana adalah Ismail Banda (Ketua I Al Wasliyah periode I, tahun 1930) dan Baharuddin Ali (Bendahara Al Washliyah tahun 1934).

Usaha pertama untuk mencari dana dengan menjual buku-buku dari *Indische Drukkerij* (percetakan Belanda) dengan mendapat korting 40 %. Selain itu beberapa dermawan memberi dana untuk menerbitkan buku *Umat nabi Muhammad* karangan A. Wahab.<sup>67</sup> Semua hasil penjualan atau keuntungannya disumbangkan sebagai dana beasiswa. Ternyata beasiswa yang dikirimkan masih

---

<sup>66</sup>Sulaiman, *Al Jam'iyatul Washliyah ¼ Abad*, h. 71.

<sup>67</sup>Hasanuddin, *Al Jam'iyatul Washliyah*, h. 101.

sangat minim dan mahasiswa masih sangat kekurangan. Hingga akhirnya kelangsungan beasiswa tersebut sulit dipertahankan, sehingga PB. Al Washliyah mengajukan permohonan kepada Raja Faraouk<sup>68</sup> dan Rektor Universitas al-Azhar agar kedua mahasiswa tersebut mendapat beasiswa dari negara Mesir.<sup>69</sup>



Piagam Penghargaan PB. Al Washliyah kepada Rektor Universitas al-Azhar Tahun 1955 yang telah memberi beasiswa kepada mahasiswa Al Washliyah yang studi di al-Azhar

Walaupun negara Mesir telah memberikan dana beasiswa namun belumlah mencukupi, sehingga Majelis *Studiefonds* harus tetap mengirimkan bantuannya sampai kedua mahasiswa tersebut menamatkan studinya. Setelah itu Majelis

<sup>68</sup>Raja Farouk memerintah 1936-1952, membebaskan uang sekolah, pembelian buku dan makanan untuk siswa sekolah dasar, dalam Abd. Mukti, *Pembaharuan Lembaga Pendidikan di Mesir: Studi Tentang Sekolah-Sekolah Modern Muhammad Ali Pasya* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), h. 81.

<sup>69</sup>*Ibid.*



*Studiefonds* terhenti beberapa lama tidak mengirimkan mahasiswa ke luar negeri. Maka pada tahun 1955 Majelis *Studiefonds* kembali mengirimkan tujuh orang mahasiswa terbaiknya ke Universitas al-Azhar Mesir. Mereka itu adalah; Abd Madjid Siradj, T. Thabrani Harumy, Syamsuddin Lubis, Abbas Hamid, Hammad Hassan Lubis, Abd. Chalid Muhammad, dan seorang dari Al Washliyah Cabang Jakarta.<sup>70</sup> Setelah menamatkan kuliahnya para alumnus al-Azhar tersebut mengabdikan dirinya sebagai dosen hingga akhir hayatnya di Universitas Al Washliyah (UNIVA). Setelah pengiriman angkatan kedua tersebut kelihatannya Al Washliyah tidak mengirimkan mahasiswanya lagi dan tidak ditemukan lagi nama Majelis *Studiefonds* dalam organisasi Al Washliyah dan masalah pembiayaan mahasiswa keluar negeri diserahkan kepada Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (MPPK) Al Washliyah yang bekerja sama dengan Universitas al-Azhar.

---

<sup>70</sup> Sulaiman, *Al Jam'iyatul Washliyah ¼ Abad*, h. 301.